



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN  
DITJEN PERKERETAAPIAN**

**JAKARTA, 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2022 ini disusun dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kebijakan dan pembinaan di unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	5
<b>2. KONDISI SAAT INI</b> .....	6
2.1. Kondisi Umum.....	6
2.2. Realisasi Program Pembangunan .....	8
2.3. Permasalahan dan Tantangan.....	12
<b>3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 - 2020</b> .....	14
3.1. Visi dan Misi .....	14
3.2. Tujuan.....	14
3.4. Target Fisik 2020 – 2024 .....	15
<b>4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017</b> .....	17
4.1. Sasaran.....	17
4.2. Strategi.....	17
4.3. Arah Kebijakan.....	18
4.4. Program Pembangunan.....	18
4.5. Kegiatan Pembangunan.....	19
<b>5. PENUTUP</b> .....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Fisik Program Kegiatan 2015- 2017 .....	15
Tabel 2	Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan 2015- 2017 .....	16
Tabel 3	Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian .....	19
Tabel 4	Target Fisik Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan.....	20
Tabel 4	Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan .....	21
Tabel 5	Target Fisik Program Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan .....	22
Tabel 6	Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan .....	23
Tabel 7	Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum .....	24
Tabel 8	Target Fisik Program Peningkatan Kinerja dan Kajian Kebijakan KA ....	25

## 1. PENDAHULUAN

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024 yang telah disusun unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, maka sesuai tugas pokok dan fungsi serta penyesuaian kewenangan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 yang kemudian merumuskan prioritas-prioritas kebijakan dan pembangunan bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2022 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda kebijakan dan pembangunan Ditjen Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan pendanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. KONDISI SAAT INI

### 2.1. KONDISI UMUM

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia, maka pergerakan manusia dan barang pun ikut mengalami peningkatan. Peningkatan pergerakan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat. Berbagai kelebihan angkutan kereta api dibandingkan dengan moda lain diantaranya adalah daya angkut yang besar baik dalam satuan jumlah penumpang maupun barang (ton), pemakaian energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

Namun kondisi perkeretaapian di Indonesia saat ini dimana jaringannya sebagian besar masih merupakan peninggalan jaman pemerintahan Belanda sangat membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif. Berbagai keunggulan moda kereta api diatas belum dapat dioptimalkan, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang.

Dari uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa moda transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun barang masih kurang kontribusinya dibandingkan dengan moda lainnya. Angkutan barang masih didominasi oleh transportasi darat (truk) dan laut (kapal). Keterbatasan transportasi kereta api adalah kurangnya aksesibilitas jaringan menuju pelabuhan sebagai simpul utama barang ekspor/impor. Dengan mengalihkan angkutan barang ke kereta api, maka diharapkan dapat mengurangi beban jalan raya.

Untuk angkutan KA penumpang perkotaan (lokal) saat ini menjadi “primadona” di wilayah Jabotabek terutama yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu Tangerang, Serpong, Bogor, Bekasi. Program pengembangan angkutan KA perkotaan menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar/metropolitan.

Lebih lanjut program tersebut diarahkan untuk kota besar (berpenduduk di atas 3 juta) lainnya seperti Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Dengan layanan kereta api urban bertenaga listrik yang terintegrasi intra dan antar moda dengan moda jalan. Layanan bisa berupa kereta komuter dari sub-urban ke pusat kota, kereta regional dan lokal serta layanan intra kota dengan frekuensi tinggi. Diharapkan peran kereta api mencapai setidaknya 10% dari seluruh perjalanan urban.

Pelayanan angkutan KA penumpang jarak menengah secara umum melayani proporsi pasar yang relatif rendah dibandingkan moda jalan. Pelayanan angkutan KA jarak menengah diantaranya Jakarta – Bandung (170 Km), Semarang – Cepu (139 Km), Surabaya – Malang (88 Km), Surabaya – Kertosono (76 Km), Semarang – Solo (109 Km). Tetapi terdapat juga koridor padat pelayanan angkutan KA jarak menengah seperti Jakarta – Cirebon (226 Km), Semarang – Tegal (150 Km), Yogyakarta – Solo (59 Km) yang memiliki load faktor minimal 80% dari kapasitas angkut kereta, bahkan tidak jarang melebihi kapasitas angkut kereta tersebut.

Untuk angkutan penumpang jarak jauh kereta api juga telah semakin tertinggal dengan angkutan transportasi udara. Walaupun secara teknologi kereta api memungkinkan untuk menunjang transportasi jarak jauh (darat) dengan kecepatan tinggi tetapi di Indonesia prasarana dan sarana yang ada belum menunjang hal tersebut. Namun arah kedepan pengembangan kereta cepat saat ini telah ada, yaitu dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung.

Untuk mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah (APBN) maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Dengan perubahan paradigma sehubungan dengan amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka upaya untuk memajukan perkeretaapian nasional menjadi lebih terbuka. Salah satunya adalah dalam hal investasi di bidang

perkeretaapian yang saat ini sudah mulai ikut sertanya swasta maupun Pemda dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Investasi kereta api yang potensial dikembangkan adalah kereta api cepat Jakarta – Bandung, kereta api bandara yaitu diantaranya KA Bandara Soekarno Hatta, LRT, MRT, Kereta Freeport.

Dengan terbatasnya cadangan energi nasional dan peningkatan kebutuhan energi untuk aktivitas transportasi, bagaimanapun peran perkeretaapian nasional tetap strategis, mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya. Oleh karenanya harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal dan layak operasi. Untuk itu upaya pengembangan angkutan penumpang dan barang melalui kereta api semakin diperlukan di masa-masa mendatang, baik untuk angkutan jarak jauh, menengah maupun perkotaan (lokal) seperti di kota-kota besar yang menghadapi problema kemacetan lalu lintas.

## **2.2. REALISASI PROGRAM KEGIATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**

Sebagai unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian, kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2020 meliputi :

a. Tahun 2020 :

- 1) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian.
- 2) Pembahasan Renstra Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024;
- 3) Rapat Workshop Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2020 Dan Pembahasan Konsep Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian;
- 4) Bimbingan Teknis Penerapan SMKP dalam Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Prasarana Perkeretaapian;
- 5) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian di Jalir KA Akses Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo dan di wilayah BTP Jakarta dan Banten;
- 6) Penilaian Keselamatan (*Safety Assessment*);
- 7) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api di DAOP 2 Bandung, DAOP 5 Purwokerto, DIVRE 4 Tanjungkarang;



- 8) Evaluasi Keselamatan Kereta Api di DAOP 8 Surabaya terkait kecelakaan di perlintasan JPL.75;
- 9) Workshop Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dalam Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Prasarana Perkeretaapian;
- 10) Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) kepada Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian melalui Sistem Online;
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
- 12) Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD);
- 13) Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI);
- 14) Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Ir. H Djuanda Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 15) Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian di Wilayah DAOP 6 Yogyakarta, Kota Solo Provinsi Jawa Tengah, di Wilayah DAOP 5 Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
- 16) Workshop Ahli Hukum Perkeretaapian melalui Sistem Online;
- 17) Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) melalui Sistem Online;
- 18) Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Renstra Tahun 2020-2024;
- 19) Survey dan Koordinasi untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian di Kota Surakarta, Solo Jawa Tengah;
- 20) Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan RKA Tahun 2021 dan Menginput ke Dalam Aplikasi E-Planning Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Medan, Sumatera Utara;
- 21) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024;
- 22) Pembahasan Usulan RKA Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;
- 23) Rapat Pembahasan Perlintasan Kereta Api Jl. H. Dul Depok di Ruang Rapat

Dinas Perhubungan Kota Depok;

- 24) Rapat Sharing Session dan Serah Terima Perizinan Pengangkutan Barang B3 di Bandung;
- 25) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum Bidang Perkeretaapian di Surakarta, Jawa Tengah;
- 26) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana Perkeretaapian di Wilayah DAOP 2 Bandung
- 27) Kegiatan P4GN di Divre 4 Tanjung Karang;
- 28) Monitoring Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian;
- 29) Administrasi Ketatausahaan;
- 30) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022 dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan.

b. Tahun 2021 :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
- 2) Sosialisasi dan Promosi Keselamatan terhadap Masyarakat dan Instansi Terkait;
- 3) Audit Keselamatan Perkeretaapian;
- 4) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
- 5) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian;
- 7) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian;
- 8) Monitoring dan Evaluasi Serifikasi SDM Perkeretaapian;
- 9) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 10) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian;
- 11) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
- 12) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian;
- 13) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA;
- 14) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian;
- 15) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian;
- 16) Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
- 17) Penyusunan Pedoman Teknis;

- 18) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian;
- 19) Administrasi Ketatausahaan;
- 20) Penyusunan Laporan Keuangan;
- 21) Administrasi Kegiatan dan Pelelangan;
- 22) Belanja Sewa;
- 23) Perawatan BMN;
- 24) Langganan Daya dan Jasa;
- 25) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022, dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan Perkeretaapian.

c. Tahun 2022 :

- 1) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
- 4) Penyusunan Pedoman Teknis;
- 5) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi;
- 6) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian;
- 7) Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional;
- 8) Audit Keselamatan Perkeretaapian;
- 9) Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
- 11) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian;
- 12) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam;
- 13) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api;
- 14) Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api;
- 15) Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian;
- 16) Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian;
- 17) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian;
- 18) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian;

- 19) Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian;
- 20) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P\$GN) pada Transportasi Kereta Api;
- 21) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian;
- 22) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian;
- 23) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
- 24) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian;
- 25) FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian;
- 26) Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (*Railway Safety Awards*);
- 27) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian;
- 28) Workshop Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan di Bidang Perkeretaapian;
- 29) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian;
- 30) Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian;
- 31) Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 32) Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
- 33) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
- 34) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api;
- 35) Administrasi Ketatausahaan;
- 36) Honor Operasional Satuan Kerja;
- 37) Administrasi Kegiatan dan Pelelangan;
- 38) Perawatan BMN;
- 39) Langgan Daya dan Jasa;
- 40) Belanja Sewa;
- 41) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022 dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit, Keselamatan KA;
- 42) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Permerintah (SPIP);
- 43) TIM SAK;
- 44) TIM SABMN.

## PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh transportasi perkeretaapian pada masa yang akan datang adalah masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya kapasitas angkut dan kapasitas lintas serta masih kurangnya fasilitas keterpaduan dengan moda lain.

Demikian pula pada bidang keselamatan perkeretaapian, pada sarana perkeretaapian, terbatasnya kapasitas angkut kereta api saat ini diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan jumlah armada terutama untuk kereta api ekonomi.

Dengan program peningkatan aksesibilitas angkutan KA diharapkan ketersediaan armada KA dapat ditingkatkan diantaranya dengan pengadaan sarana KA baru serta modifikasi. Adapun pada prasarana perkeretaapian, kondisi fisik secara umum dan bertahap mengalami perbaikan, namun di beberapa lokasi perlu penanganan serius khususnya daerah yang diidentifikasi rawan kecelakaan dan banjir/longsor.

Disamping dari permasalahan tersebut di atas, permasalahan teknis lainnya adalah :

- Masih sering terjadinya kecelakaan kereta api
- Masih banyaknya perlintasan sebidang dan perlintasan liar yang rawan kecelakaan.
- Masih banyaknya masyarakat yang menempati / bertempat tinggal dekat jalur kereta api.
- Masih adanya upaya-upaya pengrusakan, pelemparan atau pencurian fasilitas perkeretaapian

Terkait dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan keselamatan dilakukan perbaikan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang ada selain pembangunan-pembangunan baru, optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan keselamatan pada sarana, prasarana dan fasilitas lain, peningkatan kompetensi dan kecakapan SDM, penertiban pelanggaran dan penyidikan, pengujian dan sertifikasi kelaikan operasi sarana perkeretaapian serta penataan kelembagaan organisasi keselamatan perkeretaapian. Diharapkan dengan

terlaksananya program tersebut akan meningkatkan keselamatan dan sekaligus kualitas pelayanan sehingga pangsa pasar angkutan KA dapat ditingkatkan.

### 3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2020-2024

#### 3.1. VISI DAN MISI

Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pada arahan Presiden, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, termampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* (membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus).
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### **Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Berdasarkan mandat, penugasan, isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi dari perkeretaapian pada saat ini, maka untuk perumusan arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

**“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Andal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**



## **Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi yang akan dilaksanakan (mission to be accomplished) oleh Ditjen Perkeretaapian pada periode 2020-2024, yakni:

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

## **Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 3 butir sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

## **Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran Program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.
3. Sasaran program yang ingin dicapai dalam Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal.

## Visi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menjadi organisasi untuk Perkeretaapian yang andal dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“ Mewujudkan Perkeretaapian yang andal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi dan terjangkau”

## Misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendukung misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor 3(tiga) yaitu meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif . Misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Keselamatan perkeretaapian dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

1. Meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimtek dan supervise serta evaluasi pelaporan bidang keselamatan perkeretaapian yang bermanfaat
2. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

## 3.2. TUJUAN

Tujuan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam menyelenggarakan Perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 2 tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengendalian yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bidang keselamatan perkeretaapian;
- b. Birokrasi dan layanan publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif, dan efisien.

### 3.3. TARGET FISIK DAN PENDANAAN KEGIATAN 2020-2024

Program dan kegiatan periode tahun 2020-2024 diarahkan dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Program dan kegiatan didasarkan pada tugas-tugas unit kerja yang melekat pada struktur organisasi. Program dan kegiatan ini telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut pada masing-masing kegiatan untuk setiap tahun anggaran untuk setiap kelompok program kegiatan.

Berikut tabel target fisik program kegiatan tahun 2020-2024 bidang keselamatan perkeretaapian.

**Tabel 1** Target Fisik Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	-	100	100	100	100
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	-	95	95	95	95
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	100	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	90	90	90	90	90
	Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	-	100	100	100
	Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Persentase	100	100	100	100	100
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan	Persentase	98,64	98,41	98,5	98,6	98,7

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Persentase	100	100	100	100	100
---------------------------------------	--	------------	-----	-----	-----	-----	-----

**Tabel 2** Target Fisik Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target (volume)					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan pengendalian yang memberi nilai tambah untuk memasitikan pencapaian tujuan Direktorat ajaenderal Perkeretaapian bidang keselamatan perkeretaapian								
	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.	Persentase penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian ( SMKP)		-	77 (60% *127)	111 (60% *185)	111 (60% *185)	138 (60%* 229)	Kenaikan jumlah kriteria penilaian dalam elemen dan kriteria SMKP
		Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)		-	203	225	240	260	Penerapan dikurangi dengan pegawai yang pensiun
		Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)		3310	3100	4100	4200	4300	Penerapan jumlah pengajuan sertifikat operator perkeretaapian
		Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti		50	50	50	50	50	Tindak lanjut rekomendasi berdasarkan kenaikan kriteria SMKP
		Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	2	6	-	6	7	8	Jumlah kegiatan studi pendukung untuk NSPK
		Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian		1	1	2	1	1	Jumlah sertifikasi akreditasi badan hukum Pendidikan pelatihan
2	Birokrasi dan layanan publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif dan efisien								
	Terwujudnya goodgovernance dan cleangovernment	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan		98,6 4	98,4 1	98,5	98,6	98,7	Persentase daya serap anggaran Dlrktorat Keselamatan Perkeretaapian
		Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian		1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	Persentase Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian

**Tabel 3 Target Fisik Program Direktorat  
Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target
			2019	2020
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	-	-
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	67,57	36
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase		100
Terlaksana Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	-	50
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	2	1
Meningkatnya kinerja Pengendalian dan Pengawasan keselamatan perkeretaapian	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Dokumen	1	1
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase penyerapan anggaran	Persentase	101,77	98,64
	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp	3,773 M	1,920 M

**Tabel 4 Target Fisik Program Direktorat  
Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		2020
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	-
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	217 (36%*603)
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	3649 (100%*3649)
Terlaksana Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	50
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	1

Meningkatnya kinerja Pengendalian dan Pengawasan keselamatan perkeretaapian	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	1
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase penyerapan anggaran	10.981.737.000
	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	1,920 M

Berikut tabel kebutuhan keuangan program kegiatan tahun 2020 – 2024 bidang keselamatan perkeretaapian :

**Tabel 5** Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Perkeretaapian 2021-2024 (Rp)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	10.539.025.000	11.592.927.500	12.752.220.250	14.027.442.275
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	392.076.000	431.283.600	474.411.960	521.853.156
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	5.496.905.000	6.046.595.500	6.651.255.050	7.316.380.555
	Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	7.680.986.000	8.449.084.600	9.293.993.060	10.223.392.366
	Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	13.810.146.000	15.191.160.600	16.710.276.660	18.381.304.326
	Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	285.532.000	314.085.200	345.493.720	380.043.092
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan	5.207.500.000	5.728.250.000	6.301.075.000	6.931.182.500
	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-
TOTAL		43.412.170.000	47.753.387.000	52.52.725.700	57.781.598.270



## 4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

### 4.1. SASARAN TAHUN 2022

Sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2022 bidang keselamatan perkeretaapian adalah:

1. Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian.
2. Meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian.
3. Meningkatnya kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat.
5. Terwujudnya peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan Perkeretaapian.
6. Terwujudnya budaya selamat di dalam masyarakat.

### 4.2. STRATEGI TAHUN 2022

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di bidang keselamatan perkeretaapian tersebut di atas maka dilakukan pendekatan (strategi), yaitu :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/ peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.

5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

#### **4.3. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022**

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2022 meliputi:

1. Melaksanakan penyiapan dan penguatan regulasi berupa pedoman teknis di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, analisis penanganan kecelakaan, kompetensi dan sertifikasi SDM, penyidikan dan penegakan hukum perkeretaapian serta kegiatan pendukung ketatausahaan dan administrasi.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengujian, perawatan dan peremajaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Meningkatkan penyediaan dan peningkatan kecakapan teknis SDM perkeretaapian.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat.
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum kepada masyarakat.
7. Menyiapkan tata hubungan kerja Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dtjen Perkeretaapian.

#### **4.4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Program pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, meningkatkan keahlian dan kecakapan SDM perkeretaapian, penyidikan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian.

Secara rinci program pembangunan tahun 2022 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan dan rekayasa keselamatan perkeretaapian.
2. Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian.
3. Peningkatan Pemeriksaan dan Analisis kecelakaan.

4. Peningkatan pengujian, perawatan dan peremajaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
5. Peningkatan Pengembangan SDM Perkeretaapian.
6. Penyidikan dan penegakan hukum bidang perkeretaapian.
7. Peningkatan kinerja administrasi dan kajian kebijakan perkeretaapian.
8. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang keselamatan perkeretaapian.

#### 4.5. KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat beberapa capaian output di Bidang Keselamatan Perkeretaapian untuk tahun 2022, adapun capaian dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 6** Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Akreditasi Lembaga	1	LEMBAGA	462.952.000
2	Sertifikasi Profesi dan SDM	1	ORANG	1.283.298.000
3	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	8	NSPK	8.892.505.000
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4	DOKUMEN	24.083.591.000
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	LAYANAN	5.523.252.000

##### a. Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian yang merupakan upaya dalam peningkatan keselamatan perkeretaapian. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut

**Tabel 7** Target Fisik Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Review Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api	1	LAPORAN	1.596.470.000
	- Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pengoperasian Konektivitas Simpul dan Ruang bersama Jalur Elevated at Grade dan Subway	1	LAPORAN	2.069.738.000
3	Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional	1	LAPORAN	668.804.000
4	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	730.069.000
5	Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	691.341.000
6	FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	266.933.000
7	Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	1	LAPORAN	1.517.112.000
8	Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	282.992.000
9	Workshop Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	452.604.000
10	Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	1	LAPORAN	404.145.000

#### **b. Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian**

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, aspek keselamatan perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas. Keselamatan perkeretaapian ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, aspek operasional dan aspek SDM. Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan agar sarana dan prasarana perkeretaapian tetap dalam kondisi yang laik operasi. Dalam aspek operasional dan aspek SDM, penyelenggara wajib melakukan pembinaan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi perkeretaapian merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 8** Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Penyusunan Sistem Manajemen K3 SMK3 di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	1.224.913.000
	- Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Audit dan Inspeksi dan Penilaian Keselamatan	1	LAPORAN	153.458.000
3	Audit keselamatan perkeretaapian	1	LAPORAN	1.704.701.000
4	Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	1.558.359.000
5	Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	287.923.000
6	Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	2.290.823.000

### c. Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Terkait dengan keselamatan perkeretaapian, program pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api adalah dalam rangka upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terulang lagi atau meminimalisasi tingkat kecelakaan dengan menganalisis sebab-sebab kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Dari hasil analisis penanganan kecelakaan diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga zero accident dapat terwujud.

**Tabel 9** Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Studi Terkait Penambahan Variabel untuk Formulasi Perhitungan Rate of Accident ROA pada LRT PT KAI APMS	1	LAPORAN	800,415,000
2	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	1	LAPORAN	308,645,000
3	Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	473,645,000
4	Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	921,875,000
5	Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,469,428,000
6	Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	541,930,000

#### d. Peningkatan Kemampuan dan Kualifikasi Keahlian SDM Perkeretaapian.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM baik operator maupun regulator melalui kegiatan pelatihan teknis dan sertifikasi mempunyai sasaran peningkatan kemampuan dan kualifikasi keahlian. Sumber daya manusia, pada operator yang langsung menangani prasarana dan sarana kereta api merupakan faktor utama dalam pengoperasian perkeretaapian. Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana yang ada tidak akan dapat secara efektif memberikan pelayanan kereta api yang baik dan aman tanpa didukung oleh SDM yang terdidik, terlatih dan bertanggung jawab.

Untuk realisasi peningkatan kemampuan SDM Perkeretaapian tersebut diprogramkan kegiatan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 10** Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Keembagaan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	- Studi Penyusunan Standar Kompetensi Ahli Keselamatan Perkeretaapian dan Pelatihan Dasar Keselamatan	1	LAPORAN	763,650,000
	- Pembangunan Sistem Informasi Akreditasi	1	LAPORAN	556,000,000
	- Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	540.900.000
2	Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	1	LAPORAN	177,420,000
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	285,532,000
4	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,283,298,000
5	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	1	LAPORAN	181,340,000
6	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	1	LAPORAN	114,951,000
7	Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,979,429,000
8	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	392,076,000
9	Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	587,330,000

#### e. Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian antara lain adalah penegakan hukum di bidang perkeretaapian yang mengarah pada peningkatan keselamatan melalui kegiatan penyuluhan pedoman tindak pidana perkeretaapian, penerapan hukum / penyidikan terhadap kecelakaan kereta api, penyidikan terhadap calo tiket kereta api, penertiban terhadap penumpang yang naik di kabin masinis, di lokomotif, di atap kereta api dan di tempat lain yang peruntukannya bukan untuk penumpang.

Untuk realisasi kegiatan tersebut diprogramkan kegiatan pada tabel berikut:

**Tabel 11** Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Penyusunan Grand Desain Pencegahan Penindakan dan Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	890,670,000
2	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	1	LAPORAN	386,598,000
3	Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	390,448,000
4	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api	1	LAPORAN	1,078,649,000
5	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	1,463,141,000
6	Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	169,530,000
7	Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	278,261,000
8	Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	1	LAPORAN	634,495,000

#### f. Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, disamping pelaksanaan kegiatan teknis diperlukan kegiatan administratif untuk menunjang kinerja penyelenggaraan perkantoran dan pertanggungjawaban kegiatan.

**Tabel 12** Target Fisik Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	716,988,000
2	Administrasi Ketatausahaan	1	LAPORAN	583,908,000
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021 serta RKT 2022, dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan	4	LAPORAN	233.042.000
4	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	LAPORAN	116.521.000



## 5. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara Pemerintahan yaitu Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh mendukung program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.